

ABSTRAK

Seiring perkembangan jaman, kalau sebelumnya seseorang atau beberapa orang pesero sebagai pendiri CV memiliki kewenangan untuk mendirikan CV sebagaimana Pasal 19 KUHD dan berkewajiban untuk mendaftarkan akta pendirian di Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD), sejak pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnyadisebut PP No. 24 Tahun 2018) dalam rangka untuk memangkas proses perizinan berusaha, setiap perizinan berusaha harus melalui satu pintu yang terintegrasi secara elektronik. Sebagai tindaklanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 kemudian disahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018). Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini mensyaratkan bagi CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri harus melakukan pencatatan pendaftaran melalui system elektronik yaitu SABU. Proses pencatatan pendaftaran CV melalui SABU berbedadengan proses pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri, untuk proses pencatatan pendaftaran CV melalui SABU ini dilakukan berdasarkan permohonan dari pemohon. Penulisan ini membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Apakah pendiri Persekutuan Komanditer (CV) mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU; dan Apakah Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pendiri CV dengan adanyaP ermenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan pendaftaran CV karena pencatatan pendaftaran ini sifatnya wajib. Namun dalam system pelaksanaannya untuk melakukan pencatatan pendaftaran CV melalui SABU pendiri CV tidak dapa tmelakukan secara langsung, melainkan melalui permohonan pemohon yaitu dengan cara pemberian kuasa kepada Notaris; dan Kuasa yang diberikan oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu CV kepada Notaris sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 merupakan

ABSTRACT

As time goes by, previously if someone or several pesero as the founder of CV had the authority to establish a CV as stated in Article 19 KUHD and obliged to register the deed of establishment in the District Court (Article 23 KUHD), but now the government has ratified Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Licensing Services Electronic Integrated Effort (hereinafter referred to as PP No. 24 of 2018) in order to cut down the licensing process, every licensing process must through an electronically integrated one door. As a follow up to PP No. 24 of 2018, then the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 is passed on the Registration of the Commander Association, Firm Fellowship and Civil Alliance (hereinafter referred to as Permenkumham Number 17 Year 2018). Permenkumham Number 17 Year 2018 requires CVs that have been registered in the District Court to register registration through an electronic system called SABU. The process of recording CV registration through SABU is different from the CV registration process through the District Court, for the process of recording the CV registration through SABU is done based on the request of the applicant. This writing discusses 2 (two) problems, namely whether the founder of the Communist Fellowship (CV) has the authority to carry out registration of the Commissioner Alliance (CV) registration through SABU; and whether the Notary has the authority to register the registration of the Commanders Association (CV) through SABU. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the Founder of CV with the existence of Permenkumham Number 17 Year 2018 as in Article 23 paragraph (1) has the authority to register CV registration because the registration of this registration is mandatory. But in the implementation system to register CV registration through SABU, the founder of CV cannot do directly, but through the request of the applicant, namely by giving power of attorney to the Notary; and Power of Attorney given by the founder together or allies of CV to a Notary as based on Article 1 number 6 Permenkumham Number 17 Year 2018 as the legal basis of the Notary's authority in carrying out registration of CV registration through SABU.

Key words : Authority of the Founder of the Communal Alliance (CV), AuthorityNotary, Registration of Registration of Commander Association (CV), Business Entity Administration System (SABU).